YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PEMERINTAHAN BAYANGAN DALAM PENGELOLAAN PASAR KAGET DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU (STUDI DI PASAR KAGET PAHLAWAN KERJA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Mochamad Andre Budiawan
NPM :177310728

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul "Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan-Damai)". Dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usalan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Ibunda Masrinah Binti Muhammad Zam dan Abah Buswatir, SE. Bin H.M Noer tercinta yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang dan kebanggaan tiada henti terhadap penulis agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan yang selalu memberikan doa yang tulus demi kelancaran studi penulis serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Untuk keluarga dan kerabat yang selalu memberikan support yang membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Kelas A Terutama Jumiyanti Syafitri yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis, kemudian Aldi Pangestu dan Alvin Hidayat yang dari awal masuk kuliah himgga saat ini selalu menjadi sahabat terbaik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	: Mochamad Andre budiawan
NPM	: 177310728
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Penulis,

Mochamad Andre Budiawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
SURAT PERNYATAAN ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 10
A. Studi Kepustakaan 10
1. Konsep Pemerintahan 10
2. Konsep Shadow State 12
3. Konsep Local Strongman 15
4. Konsep Pengelolaan Pasar 17
5. Konsep Kekuasaan 21
6. Konsep Kewenangan 23
7. Konsep Kecamatan 24
B. Penelitian Terdahulu 27
C. Kerangka Pikiran 27
D. Konsep Operasional 29
E. Operasional Variabel 30

BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Tipe Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 31
C. Informan Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 35
G. Jadwal Kegiatan Penelitian 38

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 39
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 39
1. Keadaan Demografis Kota Pekanbaru 39
B. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai 41
1. Keadaan Demografis Kecamatan Marpoyan Damai 41
2. Keadaan Sosial Kecamatan Marpoyan Damai 42
3. Keadaan Ekonomi Kecamatan Marpoyan Damai 44

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai 45
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan..... 46
E. Gambaran Umum Kelurahan Maharatu..... 54
1. Keadaan Demografis Kelurahan Maharatu 54
F. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan..... 55

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
A. Identitas Informan..... 62
B. Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Kasus Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai) 64
1. Kontrol Sosial 74
2. Strategi Bertahan..... 83
3. Pembangunan Eksistensi Lokal 88
C. Faktor-faktor penghambat mengenai Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 89

BAB VI PENUTUP 91
A. Kesimpulan..... 91
B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA..... 93

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
II.1	:	Penelitian Terdahulu Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Kasus Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai).....	27
II.2	:	Operasional Variabel Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Kasus Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai).....	30
III.1	:	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	38
IV.1	:	Batas Wilayah Kota Pekanbaru.....	39
IV.2	:	Daftar Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	40
IV.3	:	Batas Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.....	41
IV.4	:	Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Kelurahan.....	41
IV.5	:	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.....	42
IV.6	:	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Marpoyan Damai	42
IV.7	:	Jumlah Pendidikan Formal Menurut Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai.....	43
IV.8	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Jenisnya di Kecamatan Marpoyan Damai.....	44
IV.9	:	Batas Wilayah Kelurahan Maharatu.....	54
IV.10	:	Luas Wilayah Kelurahan Maharatu.....	55
V.1	:	Identitas Informan.....	62
V.2	:	Rekap Pasar Kaget di Kecamatan Kota Pekanbaru.....	73
V.3	:	Rekap Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar			Halaman
II.2	:	Kerangka Pemikiran Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai).....	28
III.1		Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif.....	35
IV.1		Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai.....	45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama	: Mochamad Andre Budiawan
NPM	: 177310728
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang didetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2021
Pelaku Pernyataan

Mochamad Andre Budiawan

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama	: Mochamad Andre Budiawan
NPM	: 177310728
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang didetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Maret 2021
Pelaku Pernyataan

METERAI TEMPEL
B94AJX093136132

Mochamad Andre Budiawan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PEMERINTAHAN BAYANGAN DALAM PENGELOLAAN PASAR KAGET DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU (STUDI DI PASAR KAGET PAHLAWAN KERJA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI)

ABSTRAK

Mochamad Andre Budiawan

Kata Kunci : Local Strongman, Pemerintahan Bayangan, Pengelolaan Pasar Kaget

Penelitian ini mengkaji tentang Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai). Tipe penelitian yang berlokasi pasar kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai ini adalah deksriptif dengan metode kualitatif yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator. Hasil penelitian mengenai Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai) dianalisis melalui tiga indikator indikator. *Pertama* Kontrol Sosial atau pengendalian sosial Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai, maupun Pemerintah Kelurahan Maharatu sudah melakukan kontrol sosial melalui penertiban dalam pengelolaan pasar kaget tetapi untuk pengelolaan pasar kaget itu sendiri aktor yang terlibat didalamnya merupakan local strongman yang mempunyai otoritas yang berpengaruh di lingkungan masyarakat yang memang mempunyai lahan untuk mendirikan ataupun mengadakan keberadaan pasar kaget tersebut. *Kedua* Strategi Bertahan ditemukan bahwa pasar kaget tetap bertahan walaupun tidak mempunyai izin resmi dikarenakan pasar tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat lebih banyak memilih melakukan transaksi jual beli di pasar kaget dari pada pasar resmi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. *Ketiga* Pembangunan Eksistensi Lokal ditemukan bahwa pemerintahan setempat kalah dengan eksistensi keberadaan local strongman, dapat dilihat melalui masih berjalannya aktivitas pasar meskipun tidak memiliki izin resmi atau termasuk dalam pasar yang illegal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SHADOW STATE IN THE MANAGEMENT OF SHOCK MARKET IN MARPOYAN DAMAI DISTRICT, PEKANBARU CITY
(STUDY IN SHOCK MARKET PAHLAWAN KERJA IN MARPOYAN DAMAI DISTRICT)

ABSTRACT

Mochamad Andre Budiawan

Keywords: Local Strongman, Shadow State, Shock Market Management

This research examines Shadow State in Management of Shock Market. Marpoyan Damai District, Pekanbaru City (Study in the Shock Market Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai District). This study aims to determine the Shadow State in the Management of the Shock Market in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City (Study in the Shock Market in Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai District). This type of research, which is located in the shock market of Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai District, is descriptive with a qualitative method, namely research that seeks to describe the object or subject under study in accordance with what it is, and to explain variables and indicators. The results of the research on Shadow Government in the Management of the Shock Market in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City (Study in the Shock Market Pahlawan Kerja, Marpoyan Damai District) were analyzed through three indicator indicators. *The first is* Social Control or social control of the Pekanbaru City Government, the Marpoyan Damai District Government, and the Maharatu Village Government have carried out social control through curbing the management of the shock market but for the management of the shock market itself, the actors involved are local strongmen who have influential authority in the environment. people who do have the land to establish or organize the shocked market. *Both* Defense Strategies found that the shock market persisted even though it did not have an official permit because the market was able to meet the basic needs that were really needed by the community so that people preferred to make buying and selling transactions in the shock market rather than the official market managed by the Pekanbaru City Government. *Third* Development of Local Existence, it is found that the local government is inferior to the existence of a local strongman, it can be seen through the ongoing market activity even though it does not have an official license or is included in an illegal market.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan serta dibagilah Indonesia itu atas daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonom atas otonomi dan tugas pembantuan.

DalamUndang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara nyata ada serta diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan juga kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, baik berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang seras, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintaha daerah dalam rangka menjga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan Pusat dan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah,Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusanpemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :

a) Pendidikan
b) Kesehatan
c) pekerjaan umum dan penataan ruang
d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
e) sosial

2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :

a) tenaga kerja;
b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c) pangan;
d) pertanahan;
e) lingkungan hidup;
f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan
r) kearsipan.

Selanjutnya urusan pemerintahan pilihan meliputi :
a. Kelautan dan perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energi dan sumber daya mineral
f. Perdagangan
g. Perindustrian dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Transmigrasi.

Selain itu, Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Diantaranya yaitu :

a. Politik luar negri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan fiskal
f. Agama

Pasar merupakan suatu tempat yang seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam berbelanja dan menjadi tempat sebagai mata pencaharian masyarakat sekaligus pemasukan retribusi daerah. Pengelolaan dan pembangunan pasar dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dalam hal perdagangan yang merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan. Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi berupa:

a. Pembangunan pasar; dan/atau
b. Pengembangan pasar termasuk renovasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada umumnya masyarakat mengenal 2 jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli disertai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Pasar tradisional menjual bahan pokok kebutuhan seharu-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa yang bisa di tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern yang umumnya terdapat dikawasan perkotaan, sebagai penyediaan barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pasar modern banyak digunakan oleh anggota masyarakat kelas menengah ke atas, diantaranya seperti mall, supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, swalayan, dan lainnya.

Sejauh ini, masyoritas pasar kaget termasuk kedalam golongan pasar tradisional yang pada umumnya terbentuk secara spontan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat di daerah permukiman sekitar dan biasanya menggunakan lokasi yang tidak semestinya diperuntukan sebagai pasar. Hal tersebut dapat membebani sarana dan prasarana yang memang tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah pasar dengan layak disekitar permukiman masyarakat dikarenakan pasar kaget sendiri tidak mendapatkan izin resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengelola pasar.

Pasar kaget ini sendiri dapat dikatakan dikelola oleh pemerintahan bayangan yang melibatkan local strongman didalam pengelolaannya, dimana pasar ini tetap ada meskipun tidak memiliki izin seharusnya dari pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan bayangan dan juga local strongman biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang ketika terjadi pelapukan fungsi pada institusi pemerintahan formal. Penyebabnya adalah dikarenakan para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekatan sosial, ekonomi dan politik yang dominan berada diluar struktur pemerintahan formal. Sementara local strongmen hanya dapat berdiri jika tidak terdapat Kontrol sosial yang kuat yang juga akan memungkinkan aktor ini dapat bergerak bebas dalam memperluas wilayah kekuasaan, termasuk 'bekerjasama' dengan elit negara maupun birokrat lokal.

Kehadiran pasar kaget juga terjadi di Kota Pekanbaru yang saat ini sangat cepat pertumbuhannya. Terhitung ribuan pedagang yang berjualan di pasar kaget yang tersebar di setiap kecamatan Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemegang hak penempatan pasar rakyat yang dikelola pemerintah kota, pada pasal 16 (1) setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak penempatan. Dalam pasal 47 syarat pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki :

a. IUP2R untuk pasar rakyat;
b. IUPP untuk pusat perbelanjaan; dan
c. IUTS untuk Toko Swalayan

Di Kota Pekanbaru terdapat sekitar 33 pasar kaget yang tersebar di 12 Kecamatan, jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Untuk Kecamatan Marpoyan damai memiliki 11 pasar kaget di lokasi yang berbeda.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1 Jumlah pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Lokasi
1.	Marpoyan Damai	Jalan Pahlawan Kerja, Jalan Katio
		Jalan Rajawali, Jalan Tenggiri
		Jalan Nurul Amal, Jalsn Todak
		Jalan Arifin Ahmad, Jalan Bangau
		Jalan Melati
		Jalan Malem

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Pasar kaget yang tersebar di Kota Pekanbaru tidak semuanya memberikan dampak positif seperti menyediakan kebutuhan sehari-hari, memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja tetapi disisi lain karena tidak dikelola dengan baik pasar kaget juga menimbulkan banyak masalah atau dampak negatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang Pasar Kaget.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan pihak yang berperan dalam menata pasar belum bisa melakukan tindakan sehingga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini hanya bisa melakukan pendataan.

Selain terkait masalah peraturan, Pasar Kaget juga merupakan salah satu penyebab macet, seperti yang terjadi di Pasar Kaget kecamatan Marpoyan Damai, tepatnya di jalan Pahlawan Kerja, lokasi yang dipakai pedagang dalam berjualan hingga ke bahu jalan dan menyebabkan kemacetan. Masalah retribusi juga merupakan masalah yang terdapat di Pasar Kaget, karena para pedagang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjualan di Pasar Rakyat dikenakan biaya retribusi, sedangkan di Pasar Kaget tidak ada biaya retribusi dari pemerintah melainkan membayar biaya sewa bulanan dan harian kepada tuan tanah. Sehingga tidak ada memberikan masukan anggaran kepada daerah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kemana selama ini biaya dari penyelenggaraan pasar kaget tersebut.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Terbentuknya pengelolaan pasar kaget di Kota Pekanbaru belum diatur secara legal formal.
2. Belum optimalnya penempatan lahan tempat berjualan dan lahan parkir yang sesuai mengakibatkan terjadinya macet di sekitar wilayah pasar kaget.
3. Belum adanya biaya retribusi yang di kenakan kepada pedagang di pasar kaget melalui peraturan daerah berbeda dengan pedagang di pasar rakyat yang dikenakan biaya retribusi oleh pemerintah sehingga tidak memberikan masukan anggaran kepada daerah dan hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan kemana selama ini pedagang membayar biaya untuk menyewa tempat dipasar kaget.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)?
2. Apa faktor-faktor penghambat mengenai Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan-Damai).
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat mengenai Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan-Damai).

B. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti luas dan arti sempit yang maknanya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam Pemerintahan itu sendiri. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah, dalam konteks ini ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai kegiatan menyuruh untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Napitupulu (2007:9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2007:7).

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material yaitu Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu cara untuk menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. (Yusri Munaf 2016:47)

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut Ryaas Rasyd dalam Giroth (2004:65) yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta meyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan antara hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam atau keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintahan dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan-pertentangan.
4. Pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
5. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Sitanggang (1998:119) tujuan diadakannya Pemerintah adalah untuk mewujudkan suatu Negara yaitu kebahagiaan bersama sesuai dengan asas negaranya yang mana tidak lepas dari sifat kemanusiaan masyarakatnya secara mikro dan juga makro, sedangkan bagi bangsa Indonesia keberadaan pemerintah adalah kehendak dari rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintahan menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988:171) merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara di dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan yang tidak hanya melaksanakan tugas eksekutif saja, melainkan tugas-tugas lainnya termasuk juga tugas eksekutif dan yudikatif.Pengertian Pemerintahan memiliki perbedaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan pemerintah karna pemerintah adalah mencakup pengertian tentang struktur kekuasaan suatu negara, sedangkan pemerintahan lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat diatas Pemerintahan dalam memiliki objek metrial negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun di dalam paradigm baru, pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat sehingga dapat dimaknai pemerintahan sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat didalam suatu pemerintahan/negara.

2. Konsep Shadow State

Dari studi state society relations, keberadaan dari praktik shadow state sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru pada tataran teoritis diskusi dikalangan para pengamat tentang fenomena shadow state. Hal ini sudah muncul dipermukaan sejak awal tahun 1990-an. Di Indonesia menurut Nordholt dalam Hidayat (2007:63) kemungkinan praktik shadow state dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terjadi pada periode pasca pemerintahan saat orde baru.

William Reno, (1995:2) menyajikan gambaran yang mendalam mengenai praktik shadow state dan juga melakukan review kritis tentang keunggulan dan kelemahan dari shadow state ini sendiri. Keberadaan shadow state state sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya praktik informal market yaitu *legally proscribed production and exchange that contributes no revenues to government* (produksi dan pertukaran yang ditentukan secara hukum yang tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah). Sementara shadow state

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itu sendiri telah didefinisikan oleh sebagai *the emergence ofrulers drawing authorityfrom their abilities to control markets and their material rewards* (munculnya penguasa yang menarik otoritas dari kemampuan mereka untuk mengendalikan pasar dan imbalan material mereka).

Kehadiran dari informal market dan shadow state disebabkan karena terjadi karena adanya pelapukan fungsi institusi formal negara bersamaan dengan adanya krisis ekonomi. Oleh karena itu Reno (1995:4) menjelaskan konsep shadow state atau lebih kongkrit pemerintahan bayangan biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang tatkala terjadi pelemahan fungsi pada institusi pemerintahan formal. Ini disebabkan akibat para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik yang lebih dominan berada diluar struktur pemerintahan formal. Konsekuensinya akan muncul apabila adanya praktik shadow state dimana penyelenggaraan pemerintahan akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas diluar struktur pemerintahan dari pada otoritas formal dalam struktur pemerintahan.

Shadow state atau negara bayangan menurut Harris White (2003:89) adalah bagian dari perekonomian informal dan 'riil' yang tidak dapat berjalan tanpa sebuah negara dengan bentuk tertentu. Secara analitis konsep negara bayangan dapat dipisahkan dari pengertian negara sebagai sebuah kumpulan lembaga dan penguasa politik dan eksekutif yang berpusat pada pemerintah. Negara bayangan justru merupakan bagian negara yang benar-benar ada dimana lebih besar dari negara formal karena merupakan negara yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesungguhnya, termasuk bayangannya dan berkepentingan dalam mengekalkan sebuah negara formal yang sakit dan keropos.

Ada empat karakteristik umum dari praktik informal market dan shadow state yaitu Menurut Harris-White :

1. Informal market dan shadow state hadir tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal negara, keadaanya akan lebih buruk bila disertai oleh krisis ekonomi yang akut.
2. Akumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek dan manfaat ekonomi di luar bingkai regulasi formal merupakan tujuan utama dari transaksi melalui informal market. Pada konteks ini masing-masing pihak akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kemudian diperjualbelikan dalam informal market.
3. Modus operandi atau mekanisme kerja dari informal market dan shadow state cukup bervariasi yang secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori utama yaitu melalui memanipulasi kebijakan public dan melalui jaringan aliansi atar personal individual alliances maupun aliansi antar lembaga institutional alliances.
4. Aktor pelaku yang terlibat dalam informal market dan shadow state adalah para penyelenggara negara state actors dan aktor-aktor dalam masyarakat social actors. Misalnya para pengusaha dan elite masyarakat lainnya yang dikelompokan menurut kasta kelas dan gender.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Konsep Local Strongman

Pada umumnya Local Strongmen dapat dikatakan tokoh-tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, local strongmen adalah sebuah terminologi yang identik dengan para elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwasanya konsep elit merujuk pada sekumpulan orang-orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan ataupun yang sedang berkuasa begitupun dengan local strongmen. Keunggulan elite atas massa sepenuhnya juga tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan ataupun berupa tindakan-tindakan.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab menguatnya gejala pemerintahan informal adalah dengan adanya munculnya actor shadow state dari local strongmen. Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff (2010) menjelaskan kemunculan local strongmen tidak bisa dilepaskan dari sejarah sistem politik Orde Baru, para tokoh local strongmen ini menurut mereka, merupakan orang-orang lama yang mana memiliki sumber kapital tidak terbatas, hanya karena faktor kesempatan mereka tidak bisa tampil saat Orde Baru berkuasa, mengingat reziem Orde Baru melakukan sistem dropping, sehingga para aktor-aktor lokal ini kalah bersaing dan baru bisa muncul serta eksis setelah reziem orde baru runtuh. Kemampuan kapital yang mereka miliki menjadi modal besar yang mengantarkan mereka menjadi penguasa baru (formal atau informal) menggantikan penguasa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lokal yang sebelumnya merupakan dropping dari pusat. Para broker atau orang kuat lokal ini pada umumnya selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal tergantung pada bantuan dan juga sokongan agar kebijakan pemerintah daerah menguntungkan bisnis dan posisinya.

Joel Migdal (1988:22-23) melihat ada tiga proporsi yang diajukan dalam meninjau local strongmen ini.Pertama, Local Strongmen hanya dapat berdiri jika tidak terdapat control social yangkuat. Fragmentasi atas control memungkinkan aktor ini dapat bergerak bebas dalam memperluas wilayah kekuasaan, termasuk 'bekerjasama' dengan elit negara maupun birokrat local. Kedua, Local Strongmen umumnya memiliki strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk local, yang berdasarkan kondisi ini ia memperoleh basis legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat sendiri. Ketiga, pembangunan nasional seringkali terhambat dengan eksistensi local strongmen, kasus yang bagi migdal banyak terjadi di negara dunia ketiga.

Dengan adanya kelompok ataupun institusi informal di luar negara yang mengurangi efektifitas dan kapabilitas negara, oleh Migdal sendiri ditengarai disebabkan oleh kehadiran local strongmen ataupun orang kuat lokal. Orang kuat lokal, secara konsep jelasnya didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa "tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, dan sebagainya", yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat di tempat mereka berada dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Konsep Pengelolaan Pasar

Kata Pengelolaan merupakan terjemahan dari *management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti mengatur dan mengurus. Stoner dalam Handoko (2011) menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982:124) mendefenisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secra efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia dengan memanfaatkan materiak dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Menurut H. Nystrom (2006:13) menyatakan bahwa pasar ialah suatu kegiatan yang di mana untuk menyalurkan suatu barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Sedangkan menurut Philip dan Duncan adan (2012:43) menyatakan bahwa pasar ialah suatu tempat yang diliputi oleh semua langkah yang di gunakan atau di butuhkan untuk menempatkan suatu barang yang sifatnya tangible setelah itu akan di tujukan untuk konsumen.

Pengelolaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional. Adapun dalam pengelolaan terhadap pasar beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pengawasan

Pengawasan sendiri menempati posisi yang sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat Wayan Parsa, bahwa tujuan dari pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan telah diundangkan-undangkan dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha.Pihak yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau menggunakan fasilitas umum.

3. Penataan

Setelah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban maka hal terakhir yang dilakukan adalah Penataan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Penataan merupakan proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan dilakukan bertujuan Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukkannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pemeliharaan

Kata Pemeliharaan diambil dari bahasa yunani “terein” artinya merawat, menjaga, dan memelihara.Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai, suatu kondisi yang bisa diterima.Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang (2001), pemeliharaan (maintenance) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).

Dari dua definisi pemeliharaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat.Sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya.Serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditempati.

5. Konsep Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun.Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahawa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.

(Rusadi Kantaprawira,1998) Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsurunsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.

Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota– anggota masyarakat.Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern.Wewenang sedemikianini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Konsep Kewenangan

(Jimly Asshiddiqie, 2006) menyebutkan Kewenangan sering kali disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda. - Sumber kewenangan Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan narasumber dari rakyat, fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan mengikat dan membebani rakyat seharusnya didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.

(Philipus M. Hadjon, 2005) Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

7. Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

Perangkat Daerah kabupaten / kota terdiri atas:

1) Sekretariat daerah
2) Sekretariat DPRD
3) Inspektorat
4) Dinas
5) Badan
6) Kecamatan

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut:

1) Daerah kabupaten atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten atau Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3) Rancangan Perda Kabupaten atau Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati walikota dan DPRD kabupaten atau kota, sebelum ditetapkan oleh bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.Selanjutnya kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedomahn pada Peraturan Pemerintah.Namun Rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara bupati atau walikota disampaikan kepada menteri melelui gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No.23 Tahun 2014:

1) Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

2) Persyaratan dasar meliputi:

a) Jumlah penduduk minimal
b) Luas wilayah minimal
c) Jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan
d) Usia minimal kecamatan.

3) Persyaratan teknis meliputi:

a) Kemampuan keuangan daerah
b) Sarana dan prasarana pemerintahan
c) Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk.
b) Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

Klasifikasi Kecamatan Klasifikasi Kecamatan diatur pada Pasal 223 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1) Kecamatan diklasifikasikan atas:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar.

b) Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

2) Penentuan beban kerja didasarkan padanjumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa atau kelurahan. Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Syarif Hidayat dan Abdul Malik Gisma	Good Governance Vs Shadow Statedalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Jurnal penelitian ini memiliki pokok permasalahan yang diangkat berbeda dengan penelitian penulis. Dimana jurnal ini lebih memfokuskan kepada pemerintahan daerah sedangkan penulis berbicara mengenai pasar kaget yang didalamnya juga terlibat adanya shadow state.
2.	Saprul Sinaga/ Vol.4 No.1 Tahun 2017	Pengelolaan Pasar Kaget Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbarudi Kecamatan Sail.	Jurnal penelitian ini membahas mengenai pengelolaan pasar kaget oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru sedangkan penulis meneliti unsur shadow state yang ada dalam pengelolaan pasar kaget.
3.	Bramantya Adi Nugraha/ 14010113130090	Studi Tentang Keberadaan "Terminal Bayangan" Sukun Banyumanik Kota Semarang	Jurnal penelitian ini meneliti tentang terminal bayangan yang ada di Kota Semarang sedangkan penulis mengenai shadow state pada pasar kaget.
4.	Gili Argenti/ Vol.4 No.1 Tahun 2018	Civil Society, Shadow Statedan Local Strongmendalam Kajian PolitikLokal	Jurnal penelitian ini memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian penulis dimana lebih fokus mengenai kajian politik sedangkan penulis mengenai shadow state pada pasar kaget yang berada di Kota Pekanbaru.

Sumber :Modifikasi Penulis, 2020

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut.

Gambar.II.1. Kerangka Pemikiran Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Sumber :Modifikasi Penulis, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa dan juga untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah adalahlembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah.
2. Pemerintahan adalahproses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.
3. Shadow state adalah pemerintahan atau negara bayangan dimana munculnya penguasa yang menarik otoritas dari kemampuan mereka untuk mengendalikan pasar dan imbalan material tertentuyang menguntungkan bagi mereka.
4. Local Strongman merupakan orang-orang lama yang mana memiliki sumber kapital tidak terbatas seperti tokoh-tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya masing-masing
5. Pengelolaan pasar yaitu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pasar untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.
6. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Kewenangan diartikan sebagai apa yang disebut dengan kekuasaan formal
8. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat dan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Joel Migdal (1988) Orang kuat local ataupun Local Strongman, secara konsep, jelasnya didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa "tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, dan sebagainya, yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.	Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget	1. Kontrol sosial	a.Struktur Organisasi Sosial b. Aktor yang terlibat dalam pengadaan pasar kaget
		2. Strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk lokal	a.Kepentingan Masyarakat b. Sistem Ekonomi
		3. Pembangunan eksistensi Lokal	a.Keuntungan Mekanisme Pasar b.Terbangunnya sarana prasarana aktivitas pedagang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan Kualitaf Deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriftif tentang kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2011:166). Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana menghasilkan data deskriftif mengenai kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini sangat sesuai dengan untuk diterapkan apabila penelitian tersebut bertujuan untuk memahami apakah makna yang mendasari tingkah laku pada manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan apabila peneliti ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011 : 174), dan sedangkan penelitian dekriptif merupakan penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah-masalah dan unit yang diteliti oleh peneliti. (Faisal, 2010:20)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dan juga dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari objek yang akan diteliti yang mana bertujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan juga benar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar KagetPahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan DamaiKota Pekanbaru Provinsi Riau. Alasan pemilihan judul ini adalah karena di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kota Pekanbaru masih belum di atur di dalam Peraturan Derah kota Pekanbaru sehingga adanya oknum-oknum yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan yang mengatur dan menggelola pasar kaget ini sehingga terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Penempatan lahan yang dekat dengan pemukiman yang mana sering terjadinya kemacetan akibat tidak optimalnya penempatan lahan parker, dan juga pasar kaget ini belum adanya Retribusi yang dikenakan kepada para pedagang bebeda dengan pasar rakyat yang telah dikenakan biaya retribusi oleh pemerintah pekanbaru sehingga pasar kaget ini tidak memberikan pemasukan bagi daerah pekanbaru yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan bagi sesama pedagang diantara pasar kaget dan pasar rakyat yang telah resmi.

C. Informan Penelitian

a. Informan

Informan adalah merupakan orang-orang yang mana dapat memberikan informasi kepada peneliti walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. (Bagong Suyanto:172)

b. Key Informan

Key Informan adalah merupakan orang-orang yang mengetahui dan juga memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian (Bagong Suyanto, 2005:172) dan di dalam penelitian ini yang menjadi key informan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penulis adalah pihak dari Dinas Perindustrian dan perdagangan yang mengatur pasar, disini diwakilkan oleh Kepala Seksi Retribusi di Bidang Pasar

Beberapa Informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dari Bidang Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdgangan Kota Pekanbaru
2. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan
3. Pemerintah Kelurahan diwakilkan oleh Sekertaris Lurah
4. Pedagang pasar di kaget
5. Masyarakat yang tinggal di sekitar pasar kaget

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan.Data pendukung yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada sesorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus.Dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini :

Gambar III.1. Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif

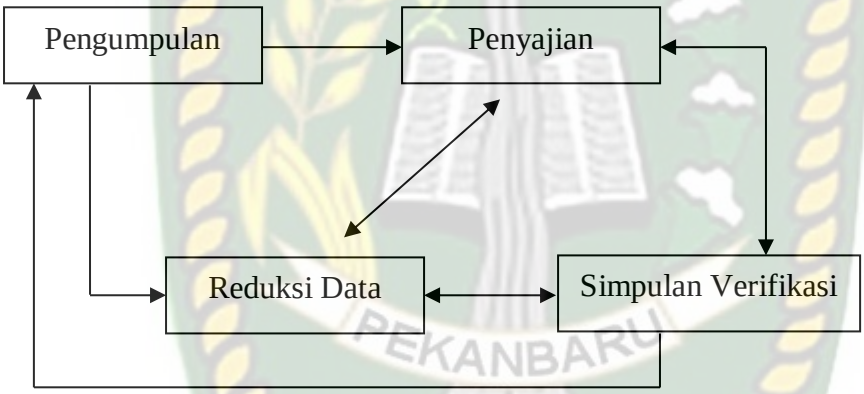

(Miles and Huberman,1992:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengsinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponentersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pertama, Tahap pengumpulan data : peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaiimana kita ketahui, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.Reduksi data bukanlah siuatu hal terpisah dari analisis.Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverfikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaanya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

Keempat, Menarik kesimpulan verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif" atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus menerus.Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.Namun dua hal dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara-cara lain dalam koridor kuantifikasi (pengukuran).

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagaimana yang dinyatakan Garna (1996:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan September 2020 sampai Januari 2021.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021									
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Persiapan dan penyusunan UP										
2	Seminar Up										
3	Riset										
4	Penelitian lapangan										
5	Penglolaaan dan analisa data										
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi										
7	Ujian skripsi										
8	Revisi dan pengesahan skripsi										
9	Penyerahan skripsi										

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang juga merupakan Ibukota Provinsi Riau. Dengan demikian Kota Pekanbaru adalah pusat perekonomian terbesar yang ada di Provinsi Riau.

Luas wilayah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan yaitu sekitar 632,26 km2. Dan secara astronomis kota pekanbaru terletak antara 1010 14'- 1010 34' Bujur Timur dan 00 25'- 00 45 Lintang Utara. Dengan batas-batas wilayah yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Batas Wilayah Kota Pekanbaru

No	Batas	Kabupaten
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kampar dan Siak
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Pelalawan
3	Sebelah Timur	Kabupaten Kampar dan Pelalawan
4	Sebelah Barat	Kabupaten Kampar

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan perekonomian penduduk yang mana pada akhirnya menyebabkan peningkatan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan juga utilitas perkotaan serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kota pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maka dari itu untuk terciptanya ketertiban pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 yaitu menjadi 12 kecamatan yang mana sebelumnya hanya ada 8 kecamatan.

Adapun Kecamatan yang saat ini ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Daftar Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan
1	Kecamatan Tampan
2	Kecamatan Marpoyan Damai
3	Kecamatan Sukajadi
4	Kecamatan Bukit Raya
5	Kecamatan Lima Puluh
6	Kecamatan Payung Sekaki
7	Kecamatan Senapelan
8	Kecamatan Rumbai Pesisir
9	Kecamatan Tenayan Raya
10	Kecamatan Sail
11	Kecamatan Rumbai
12	Kecamatan Pekanbaru Kota

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021

Darii tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan beberapa diantaranya adalah Kecamatan tampan, Marpoyan Damai, Sukajadi, Rumbai, Bukit Raya, Lima Puluh, Payung Sekaki, Senapelan, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Sail, dan Pekanbaru Kota. Sedangkan untuk Jumlah Kelurahan/Desa di Kota Pekanbaru sebanyak 58.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Pengambang, Sungai Air Hitam,Sungai Setukul, Sungai Umban Sari, Sungai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sibam, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai Siak sendiri merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat yang berada di pedalaman ke kota serta beberapa daerah-daerah lain di Provisi Riau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai

1. Keadaan Demografis Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dengan beberapa batas wilayah. Batas wilayah tersebut dapat dilihat apada tabel berikut :

Tabel IV.3 Batas Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai

No	Batas	Kecamatan/Kabupaten
1	Sebelah Utara	Kecamatan Sukajadi
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Kampar
3	Sebelah Timur	Kecamatan Bukit Raya
4	Sebelah Barat	Kecamatan Tampan

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai, 2021

Selain itu mengenai orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) di Kecamatan Marpoyan Damai menurut Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1V.4 Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Kantor Camat	Kantor Wali Kota
1	Tangkerang Tengah	3,3	14
2	Tangkerang Barat	3,4	20
3	Maharatu	7,0	20
4	Sidumulyo Timur	2,9	21
5	Wonorejo	4,5	15
6	Perhentian Marpoyan	7,3	21
Rata-rata		**3,6**	**6,5**

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai, 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecamatan Marpoyan Damai yang terletak di antara 0˚51'-0˚53' Lintang Utara dan 102˚44'-101˚45' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah 29,79 km2 dengan luas wilayah dan persentase luas wilayah masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1V.5 Tabel Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai

No	Kelurahan	Luas (km^2)	Persentase
1	Tangkerang Tengah	4,64	16
2	Tangkerang Barat	5,35	18
3	Maharatu	6,92	23
4	Sidumulyo Timur	7,19	24
5	Wonorejo	1,35	4
6	Perhentian Marpoyan	4,34	15
Jumlah		**29,79**	**100**

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai, 2021

Dari Tabel IV.2 diatas dapat dilihat beberapa luas wilayah dan persentase luas wilayah masing-masing kelurahan yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 29,79 km^2. Dengan demikan Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas.

2. Keadaan Sosial Kecamatan Marpoyan Damai

Tabel IV.6 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Marpoyan Damai.

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tangkerang Tengah	18.582	16.168	34.420
2	Tangkerang Barat	11.095	7.661	18.756
3	Maharatu	6.200	5.349	11.549
4	Sidomulyo Timur	14643	12.274	26.917
5	Wonorejo	8.507	11.736	20.243
6	Perhentian Marpoyan	9.669	10.470	20.139
Jumlah		**68.366**	**63.658**	**13.2024**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber: Kantor Camat Marpoyan Damai, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa komposisi penduduk masing-masing Kelurahan Kecamatan Marpoyan Damai didominasi oleh jumlah perempuan yaitu 68.366 jiwa, sementara jumlah laki-laki tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan jumlah perempuan yaitu 63.658 jiwa. Sementara untuk kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kelurahan Tangkerang Tengan dengan total 34.420 jiwa. Selain itu untuk kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kelurahan Maharatu dengan total 11.549 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai adalah 132.024 jiwa.

Kemudian untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Kecamatan Marpoyan damai telah tersedia untuk penduduk beberapa lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai Perguruan tinggi di masing-masing kelurahan.

Tabel 1V.7 Jumlah Pendidikan Formal Menurut Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	
		Negeri	Swasta
1	Sekolah Dasar (SD)	16	18
2	Madrasah Ibtidayah (MI)	-	2
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6	11
4	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	4
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	5
6	Madrasah Aliyah (MA)	1	3
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	7
8	Akademi/Perguruan Tinggi	2	11
Jumlah		**28**	**61**

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai, 2021

Berdasarkan tabel datas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan formal di Kecamatan Marpoyan Damai di dominasi oleh tingkatan Sekolah Dasar (SD) baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

negeri atau swasta dengan jumlah masing-masing untuk negeri 16 sementara swasta 18 sekolah. Sementara yang paling sedikit adalah Madrasa Ibtidayah dengan jumlah hanya 2 sekolah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah pendidikan formal di Kecamatan Marpoyan Damai Negeri 28 dan swasta 61 sekolahh.

3. Keadaan Ekonomi Kecamatan Marpoyan Damai

Menurut data dari BPS kota Pekanbaru, dari sisi perekonomian dikatakan bahwasanya kecamatan Marpoyan Damai relatif telah memiliki sarana dan juga prasarana yang memadai untuk memenuhi dan juga memfasilitasi kebutuhan penduduk yang ada di wilayah kecamatan marpoyan ini sendiri.

Tabel IV.8 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Jenisnya di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kelompok Pertokoan	171
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	2
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	2
4	Pasar Tanpa Bangunan	0
5	Minimarket/Swalayan*	63
6	Toko/Warung Kelontong	181
7	Restoran/Rumah Makan	1000
8	Warung/Kedai Makanan	10
9	Hotel	12
10	Hostel/Motel/Losmen/Wisma	1588
Jumlah Total		**3029**

Catatan: * yang memiliki luas < 400 m2

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes), 2021

Dengan demikian dapat dilihat bahwa jenis sarana dan prasarana yang banyak digunakan masyarakat Kecamatan Marpoyan damai adalah Hotel/Motel/Losmen/Wisma dengan jumlah 1588 unit. Sedangkan untuk pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan bangunan permanen dan pasar dengan bangunan semi permanen hanya berjumlah 2 unit, dengan total keseluruhan jenis sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai adalah 3029 unit.

C. Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai

Bagan 1V.1 Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai

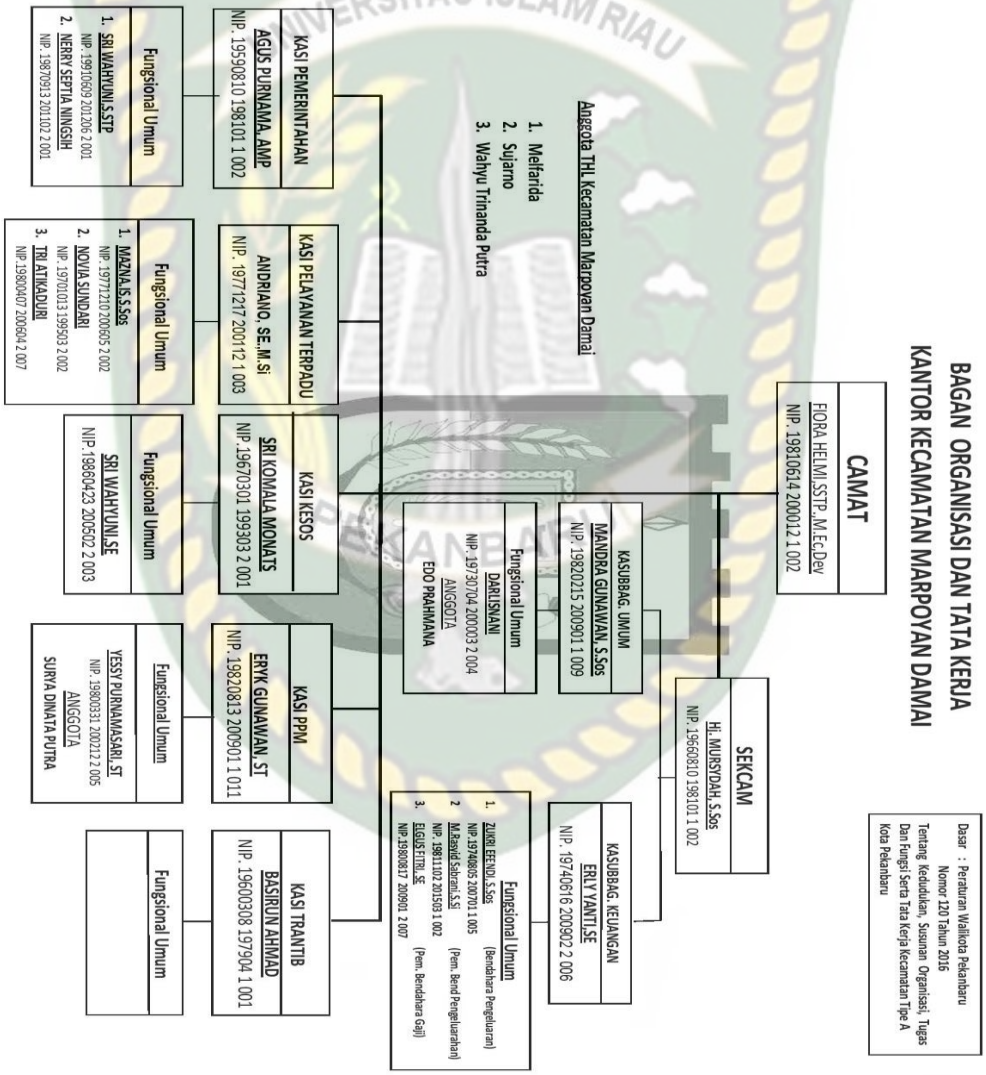

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai, 2021

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai

1. Camat

Camat mempunyai Tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya dan dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, camat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
h. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota pekanbaru yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris camat menyelenggarakan fungsi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh walikota;
b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
c. Perencanaan program kerja pemerintahan kecamatan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan;
e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordnasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
b. Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketentuan peraturan perundangundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. Perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
d. Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
f. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
g. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapatrapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan;
i. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;

4. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan;
e. Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluran;
f. Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan, Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan dan Perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan;
g. Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan, dan lain-lain.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan;
b. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
e. . Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
h. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahandan fasilitasi urusan pertanahan;
j. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di kelurahan seperti lpm, lembaga adat tp.pkk, rt/rw, karang taruna, lembaga kemasyarakatan lainnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pengoordinasian urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Pelaksanan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundangundangan;
e. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapa peraturan perundangundangan;
f. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical lain, yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan kelurahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
c. Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya serta pihak swasta dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi KesejahteraanSosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi beberapa diantaranya adalah :

a. Pengoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
b. Perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksanaan penyusunan program kerja pimbinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
d. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial;

9. Seksi Pelayanan Terpadu

Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi beberapa diantaranya adalah:

a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu kecamatan;
c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
d. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Gambaran Umum Kelurahan Maharatu

1. Keadaan Geografis Kelurahan Maharatu

Kelurahan Maharatu yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai terletak disebelah selatan dari Kota Pekanbaru dan dilihat dari arah mata angin posisi wilayah hukum Kelurahan Mahartu.

Aspek Pemerintah Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai ini merupakan kelurahan yang baru dari hasil dari pemekaran kelurahan induk yakni sebagian wilayah berasal dari simpang tiga, Kecamatan Bukit Raya dan sebagian lagi berasal dari sidomulyo timur dan kecamatan , berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2003, Kelurahan Maharatu memiliki 19 Rukun Warga (RW), dan 74 rukun tetangga (RT).

Secara Geografis, Kelurahan Maharatu yang berada di Kecamatan Damai ini terletak disebelah selatan Kota Pekanbaru, dan dilihat dari arah mata angin posisi wilayah hukum Maharatu dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel IV.9 Batas Wilayah Kelurahan Maharatu

No	Batas	Kelurahan/Desa
1	Sebelah Utara	Kelurahan Sidomulyo
2	Sebelah Selatan	Desa Kubang Raya Kabupaten Kampar
3	Sebelah Timur	Kelurahan Simpang Tiga
4	Sebelah Barat	Kelurahan Sidomulyo Timur

Sumber : Kantor Kelurahan Maharatu, 2021

Untuk mengetahui orbitrasi jarak dan waktu tempuh dari kelurahan Maharatu ke Ibu Kota Kecamatan jaraknya mencapai 3,2 km dengan waktu tempuh 5-7 menit. Dan jarak dengan Ibu Kota Pekanbaru mencapai 9.0 km dengan jarak tempuh 25-30 menit dengan kondisi jalan yang sudah aspal, hal ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juga akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang bersifat administratif.

Adapun untuk Luas wilayah Kelurahan Maharatu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.10 Luas Wilayah Kelurahan Maharatu

No	Luas Kelurahan	Km^2/m^2
1	Luas Pemukiman	16.982 Km^2
2	Luas Perkuburan	3 Km^2
3	Luas Pekarangan	55 Km^2
4	Luas Taman	850 Km^2
5	Perkantoran	192 m^2
6	Luas Prasarana dan Lainnya	-

Sumber: Kantor Kelurahan Maharatu, 2021

Berdasarkan tabel diatas wilayah Kelurahan Maharatu sebagian besar merupakan permukiman penduduk seluas 16.982 Km^2 dengan diikuti luas taman yaitu 850 Km^2, sementara luas perkarangan 55 Km^2 dan luas perkuburu 3 Km^2 dan untuk luas perkantoran hanya 192 m^2.

F. Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan Kelurahan

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Keluraha.

Untuk melaksanakan tuganya Lurah mempunyai fungsi :

a. Menyusun Program Kerja dan kegiatan kelurahan;
b. Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknik dan operasional di Kelurahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing;
d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan-kesalahan;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah, dalam kegiatan pembangunan, social, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah;
g. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan agrarian, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah;
h. Menyusun program atau kegiatan administrasi ketatausahaan dan tumah tangga Kelurahan serta memfasilitasi pembentukan, penggabungan wilayah Rukun Warga/Rukun Tetangga dilingkungan Kelurahan;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;
j. Mengevaluasi kegiatan sesuai hasil yang telah dicapai dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan bertugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan serta membantu mengkoordinasikan kegiatan dikelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja dan rencana kerja serta anggaran kegiatan Kelurahan;
b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya masing-masing serta member petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengolahan administrasi umum, kepegawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga Kelurahan;
d. Melakukan pengawasan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kelurahan dan pembinaan pegawai dilingkungan Kelurahan;
e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup Kelurahann;
f. Memeriksa dan mengkoreksi tugas yang diberikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan di Kelurahan serta memeriksa dan mengawasi proses ketatausahaan Kelurahan;
g. Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kelurahan dan menyiapkan daftar hadir serta notulen rapat;
h. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan di Kelurahan serta perawatannya kemudian melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan bertugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja bidang seksi pemerintahan kemudian mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing-masing;
b. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan
c. Membina dan mengarahkan staf dalam peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standard pelayanan yang sudah ditetapkan;
d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan bahan pelayanan Kelurahan dibidang Pemerintahan seperti memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan publikasi profil/monografi Kelurahan;
e. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan;
f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada Lurah.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya bertugas membantu Lurah dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Bina Marga dan Pengairan, Bangunan dan pemukiman, pertanian dan peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pariwisata.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Merencanakan,program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya serta membimbing pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan' serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan;
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penaggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan;
c. Membimbing Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengawasan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Membimbing Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Membimbing pelaksanan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

f. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun swasta;

h. Membuat laporan pelaksanaan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dalam bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan skala Kelurahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban bertugas membantu Lurah merencanakan , melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menyusun program kerja bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan serta mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya masing-masing;
b. Mengontol setiap kegiatan pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional seksi Ketentraman dan Ketertiban serta menyiapkan bahan pelayananKelurahan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap Sarana Ibadah,Sarana Pendidikan,Sarana Kesehatan, fasilitas umum, fasilitas social, asset milik pemerintah daerah yang ada di wilyaha Kelurahan;
d. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
e. Membina dan memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan kepada masyarakat;
f. Membantu dalam meningkatkan system keamanan terpadu diwilayah Kelurahan untuk meminimalisir gangguan keamanan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Lurah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Infroman

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai), yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini :

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian mengenai Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Tingakat pendidikan	Jabatan
1.	Saiful Amri, SE	L	50	S1	Kepala Seksi Retribusi
2.	Saptir, S.Sos	L	56	S1	Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
3.	Edwan	L	55	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai
4.	Sakinah Anggraini, S.Psi	P	37	S1	Sekertaris Lurah
5.	Putri	P	27	SLTA	Pedagang di Pasar Kaget
6.	Inang	P	64	SD	Pedagang di Pasar Kaget

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7.	Ika	P	27	SMK	Pedagang di Pasar Kaget
8.	Sarah	P	44	SMA	Masyarakat di Sekitar Pasar Kaget
9.	Dian	P	52	SMA	Masyarakat di Sekitar Pasar Kaget

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Dari tabel diatas yang menjadi key infroman dalam penelitian ini adalah bapak Saiful Amri, SE Selaku Kepala Seksi Bidanng Retribusi pada Bagian Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Saptir, S.Sos Selaku Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Bidang Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Bapak Edwan Selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Marpoyan Damai yang juga pernah ikut langsung dalam pengaturan dan penertiban Pasar Kaget di Kelurahan Maharatu, Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi Selaku Sekertaris lurah di Kelurahan Maharatu, serta 3 orang pedagang yang berjualan di pasar kaget maharatu yaitu Ibu Putri, Ibu Inang dan Ibu Ika, dan 2 orang masyarakat yang tinggal di sekitar pasar kaget yaitu Ibu Sarah dan Ibu Dian.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan diatas, Kepala Seksi Retribusi sebagai key informan dianggap mampu oleh peneliti dalam memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh penelitian sesuai indikator yang digunakan. Kemudian Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Informan yang telah disebutkan juga merupakan hal penting dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini karena dalam Pengelolaan Pasar kaget ini dan juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan Kegiatan di Pasar Kaget ini merupakan hal yang telah diketahui oleh para informan.

B. Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Kasus Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai)

Pemerintahan bayangan atau lebih dikenal dengan *shadow governance* sering terjadi di Negara manapun termasuk Indonesia. Pemerintahan bayangan ini terjadi karena disebabkan adanya pelapukan fungsi institusi formal negara yang biasanya bersamaan dengan adanya krisis ekonomi. Praktik pemerintahan bayangan ini sering kali muncul ketika para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik yang lebih dominan berada diluar struktur pemerintahan formal. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas diluar struktur pemerintahan dari pada otoritas formal dalam struktur pemerintahan.

Menurut Haris White, ada empat karakteristik umum dari praktik informal market dan shadow governance yaitu :

1. Informal market dan shadow governance hadir tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari terjadinya pelapukan fungsi dari institusi formal negara, keadaanya akan lebih buruk bila disertai oleh krisis ekonomi yang akut.
2. Akumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek dan manfaat ekonomi di luar bingkai regulasi formal merupakan tujuan utama dari transaksi melalui informal market. Pada konteks ini masing-masing pihak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kemudian diperjualbelikan dalam informal market.

3. Modus operandi atau mekanisme kerja dari informal market dan shadow governance cukup bervariasi yang secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori utama yaitu melalui memanipulasi kebijakan public dan melalui jaringan aliansi atar personal individual alliances maupun aliansi antar lembaga institutional alliances.
4. Aktor pelaku yang terlibat dalam informal market dan shadow governance adalah para penyelenggara Negara atau pemerintahan dan aktor-aktor dalam masyarakat. Misalnya para pengusaha dan elite masyarakat lainnya yang dikelompokan menurut kasta kelas dan gender.

Pada umumnya praktik pemerintahan bayangan selalu melibatkan local strongmen didalamnya, Local Strongmen dapat dikatakan adalah tokoh-tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Local strongmen adalah sebuah terminologi yang identik dengan para elit, yang merujuk pada sekumpulan orang-orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan ataupun yang sedang berkuasa begitupun dengan local strongmen.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab menguatnya gejala pemerintahan informal adalah dengan adanya munculnya actor shadow governance dari local strongmen. Joel Migdal (1988:22-23) mengatakan bahwa ada tiga proporsi yang dapat diajukan dalam meninjau local strongmen ini yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Local Strongmen hanya dapat berdiri jika tidak terdapat control social yang kuat. Fragmentasi atas control memungkinkan aktor ini dapat bergerak bebas dalam memperluas wilayah kekuasaan, termasuk 'bekerjasama' dengan elit negara maupun birokrat local.
2. Local Strongmen umumnya memiliki strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk local, yang berdasarkan kondisi ini ia memperoleh basis legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat sendiri.
3. Pembangunan nasional seringkali terhambat dengan eksistensi local strongmen, kasus yang bagi migdal banyak terjadi di negara dunia ketiga.

Pemerintahan Bayangan memalui local strongmen akan berusaha untuk memonopoli kontrol atas masyarakat di tempat mereka berada dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun. Salah satunya seperti dalam hal pengelolaan pasar yang notabenenya pasar tersebut bukan termasuk pada jenis pasar yang dikelola oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan pada Bab-bab sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pemerintahan bayangan dalam hal pengelolaan pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai. Didasari oleh hasil observasi dan isu yang berkembang dilapangan, penulis menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai yang dilakukan oleh pemerintahan bayangan dengan melibatkan local strongmen di suatu kelompok masyarakat tersebut. Dan dalam Pelaksanaannya Pasar Kaget ini tidak diatur secara legal formal sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Oleh karena itu, untuk melakuakn penelitian terkait permasalahan tersebut, maka penulis akan menganalisis menggunakan teori Joel Migdal (1988:22-23) mengatakan bahwa ada tiga proporsi yang dapat diajukan dalam meninjau local strongmen ini yaitu melalui kontrol social, strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk lokal dan pembangunan eksistensi lokal.

Adapun dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan terkai dengan Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai) yang dapat dilihat dalam penyajian pembahasan dan analisis berikut :

1. Kontrol Sosial

Kontrol sosial atau pengendalian sosial diartikan sebagai system yang digunakan untuk mengajak, mendidik bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial pada penerapan kehidupan mereka. Dalam kata lain melalui kontrol sosial dapat dijadikan alat sebagai pengendalian untuk menertibkan masyarakat sebagaimana dengan mestinya.

Menurut Veeger dalam Kolip (2010:252) kontrol sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu kontrol sosial dapat dikalsifikasikan sebagai bagian dari proses sosialisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Proses sosialisasi tersebut jika dilakukan terus menerus maka secara tidak langsung perilaku-perilaku yang diinginkan sebelumnya akan perlahan terwujud dilingkungan masyarakat. Reucek (1987 : 2) mengatakan bahwa proses kontrol sosial ini terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a) Pengendalian sosial antara individu dan individu lainnya, dimana individu yang satu mengawasi individu yang lainnya. Misalnya, seorang ayah yang mendidik anak-anaknya untuk menaati peraturan dalam keluarga. Hal ini merupakan contoh dari pengendalian sosial yang pada dasarnya pengendalian sangat lazim dalam kehidupan sehari - hari, meskipun kadang-kadang tidak disadari.

b) Pengendalian sosial antara individu dan kelompok terjadi ketika individu mengawasi suatu kelompok.

c) Pengendalian sosial antara kelompok dan kelompok lainnya, terjadi ketika suatu kelompok mengawasi kelompok lainnya. Pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari - hari agar keserasian dan stabilitas dalam kehidupan sehari - hari tercapai. Dengan pengendalian sosial ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh para anak - anak remaja. Oleh karena itu pengendalian sosial harus mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar.

Sementara dalam aspek pemerintahan kontrol sosial ini dapat digunakan untuk memperluas wilayah kekuasaan, termasuk ‘bekerjasama’ dengan elit negara maupun birokrat local.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial merupakan cara untuk mengendalikan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang telah ada ataupun peraturan yang berlaku di masyarakat setempat.

Untuk melihat bagaimana kontrol sosial yang terjadi dalam pengelolaan pasar kaget di Kecamatan Marpoyan Damai, dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saptir, S.Sos selaku Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

> *" Mengenai masalah kontrol sosial dalam pengelolaan pasar kaget itu pasti ada aktor yang terlibat didalamnya untuk melaksanakan pengadaan pasar kaget ini, sementara kita orang dinas tidak ada hubungannya sama sekali terkait dengan pengadaan pasar terutamaa pasar kaget ini. Karna yang namanya pasar kaget sampai sekarang itu tidak ada izinnya dari pemerintah yang artinya itu tidak resmi, yang pasar resmi yang ada sama kami adalah 8 pasar beberapa diantaranya seperti Pasar Rumbai, Pasar Simpang Baru Panam dan itupun baru sebagian. Jadi pasar kaget ini termasuk pasar illegal seolah-olah ada pemerintah yang melegalkannya tetapi memang kami tidak ada berhubungan sama sekali terlebih lagi memberikan izin dalam hal pengadaan pasar ini. Hanya saja mungkin ada pihak RT atau tokoh masyarakat yang memberikan izin disitu terutama untuk pasar kaget yang dipahlawan kerja ini ya, bias jadi itu izin keamanannya ataupun izin parkirnya tetapi untuk izin dari kami Pemerintah Kota memang tidak ada. Sampai sekarang tentang pengelolaan pasar kaget ini, contohnya bundaran keris walaupun itu bukan pasar kaget kita kategorikan lah ke pasar kaget dan permasalahannya memang belum clear masih terus mengadakan rapat sementara tetap jalan kan pedangang yang berjualan di bundaran keris itu*" (Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Bapak Saptir, S.Sos Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 10.30 WIB)

Selanjutnya dalam hal keberadaan pasar kaget ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir keadaan mereka yang termasuk pasar illegal, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

" Jadi dalam hal pengadaan pasar kaget ini sudah jelas itu tanah masyarakat dan masyarakat itu yang pastinya ada yang tunduk ada yang tidak, pasti disuatu tempat itu ada persaingan seperti itu ada yang tunduk ada yang tidak. Pasar kaget ini sudah pernah kami tertibkan dulu waktu awal-awal covid mungkin sekitar bulan 4 atau bulan 5 tahun 2020, bukan hanya pasar kaget pahlawan kerja saja tetapi semua pasar kaget itu kami tertibkan. Ditertibkan itu karna data mengenai pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru ini ada 83 pasar kaget dan itu bukan berkurang malah semakin bertambah. Jadi itu perlu digaris bawahi yang namanya Pemerintah Kota kebetulan kami di Dinas Pasar itu tidak pernah memberikan izin ataupun meresmikan pasar kaget ini. Yang kedua, kalau ada oknum yang mengatasnamakan pemerintah itu mungkin yang namanya RT/RW itu kan pemerintah juga bisa jadi mereka ini dalam tanda kutip yaa. Kebetulan untuk pasar kaget di Pahlawan Kerja ini saya sering lewat, jadi mengenai kondisi pasar kaget disana saya cukup taulah" (Wawancara 4 Maret 2021, Bapak Bapak Saptir, S.Sos Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 10.30 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saiful Amri, SE selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam hasil wawancara seperti berikut :

" Dalam hal pengelolaan pasar kaget ini adalah preman semua, kami tidak ada hanya oknum seperti preman. Pasar kaget ini tidak ada aturan yang mengaturnya dan sebenarnya namanya itu bukan pasar kaget tapi lebih ke pasar rakyat. Untuk pasar rakyat ini ada aturannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, cuma pasar itu tidak bisa dilegalkan karena dari syarat-syarat yang ada dalam Peraturan Daerah itu memang susah. Pertama harus ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau syarat lain untuk mengadakan sebuah pasar di lingkungan masyarakat sementara orang-orang yang ada di pasar kaget ini umumnya itu menyewa lahan sehingga membuat kemacetan, kebersihan yang tidak bagus sehingga itu yang membuat sulit untuk dilegalkan. Dari dinas itu memang tidak ada pegawai yang ditetapkan untuk mengurus pasar kaget ini" (Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Saiful Amri, SE Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya untuk melihat bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertiban pasar kaget yang termasuk kedalam pasar illegal , dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

> *“ Tentang pasar kaget ini kami ada juga membuat kajian yang akan kami lakukan untuk mungkin memperlunak atau agak sedikit mempermudah keberadaan pasar kaget. Mungkin karna ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan) harus ada lahan, kemudian juga harus ada bangunan, pedagang pasar kaget inikan umumnya menyewa lahan dan ada juga mungkin nampak lahan terbuka langsung diadakannya aktivitas berjualan. Jadi begitulah macam-macam bagaimana pasar kaget itu bisa ada terlebih lagi adanya keterlibatan dari preman setempat juga, jadi kalau untuk dilegalkan kami itu tidak bisa dilegalkan. Memang ada rencana kami dari pada capek mau menertibkan kesini tumbuh lagi disini, ditertibkan lagi masih juga tumbuh dia ditempat yang berbeda, jadi itulah yang sedang kami rencanakan dan terus mengadakan rapat untuk bagaimana cara melegalkannya. Seperti umpamanya yang telah terjadi di Bundaran Keris, dan ada juga pasar kaget itu yang sudah ada izinnya yang dekat Jalan Sigunggung kemudian ada juga yang di Jalan Uka kemaren dia mengurus perizinan dan sekarang sudah dapat izinnya. Kemudian untuk pasar rakyat swasta yang ada izinnya dan ada juga di pasar arengka satu. Perlu di garis bawahi sebenarnya penamaan pasar ini bukan pasar kaget tetapi pasar rakyat cuma karna tumbuhnya tiap hari ini atau hari ini makan orang mengatakan itu pasar kaget yang sebenarnya pasar rakyat. Kalau Pak Wali kami bilangnya itu pasar yang berpindah-pindah karna lahannya tidak tetap, pasar kaget ini tergolong ke pasar rakyat karena konsep pasar rakyat itukan pasar yang masih bisa berhubungan antara penjual dengan pembeli dan ada tawar menawar didalamnya berbeda dengan pasar modern yang langsung ada label harga jadi tidak membutuhkan interaksi antara penjual dengan pembeli”* (Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Saiful Amri, SE Kepla Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Selain itu untuk melihat bagaimana kontrol sosial yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai sebagai pihak pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat dalam hal pengelolaan pasar kaget, dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edwan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *“ Kita sudah pernah melakukan survey kelapangan terutama untuk pasar kaget di Pahlawan Kerja ya, itu tempat parkirnya kan masih menyusahkan masyarakat tetapi untuk sekarang tempat parker sudah disediakan jadi tidak terlalu menganggu ketertiban lagi makanya masyarakat sudah tidak terlalu komplain lagi tapi kalau memang mau dilegalkan ini belum ada. Kita juga melihat bagaimana kondisi masyarakat yang sekarang terlebih lagu kondisi covid begini kan, jadi keberadaan pasar kaget itu juga menguntungkanlah bagi masyarakat karna mudah dijangkau dan tidak perlu repot jauh ke pasar-pasar yang resmi”* (Wawancara, 12 Maret 2021, Bapak Edwan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Maharatu dalam hasil wawancara seperti berikut :

> *“ Untuk semua pasar kaget itukan tidak ada yang legal, dan kami dari pihak lurah tidak ada memberikan izin dalam bentuk apapun mereka beroperasioanl sewewenang mereka aja dalam artian kalau sebenarnya himbauan dari kita itu dibubarkan. Tetapi untuk pembubaran ini kan bukan sepenuhnya kewenangan kelurahan, yang dulu aja itu pembubaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, nah untuk pasar kaget yang sudah ada himbauan untuk pembubaran tetapi juga masih beroperasi kami pihak kelurahan hanya bisa menunggu perintah dari atas karna kami tidak punya wewenang untuk itu dan izinpun kami tidak pernah memberikan izin istilahnya. Sehingga dapat dikatakan pengadaan pasar kaget itu mereka beropesional mandiri tanpa ada izin dari pemerintah manapun yang biasanya dilakukan oleh preman setempatlah, cumakan ada beberapa dari masyarakat masih terganggu dengan adanya kemacetan ataupun kebersihan yang tidak terjaga sehingga membuat lingkungan mereka kumuh walaupun yang di Pahlawan Kerja ini sudah pindah ya parkirnya ke lapangan yang cuku luas tetapi sejauh ini saya liat masih terjadi kemacetan”* (Wawancara, 12 Maret 2021, Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi Sekretaris Lurah Kelurahan Maharatu, Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas mengenai kontrol sosial yang telah dilakukan baik itu Pemerintah Kota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagagangan, Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai, dan Pemerintah Kelurahan Maharatu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing Pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah melakukan pengendalian sosial ini seperti halnya dalam penertiban keberadaan pasar kaget yang jumlahnya semakin bertambah. Tetapi untuk masalah melegalkan dengan diatur melalui aturan seperti Peraturan Daerah itu masih sulit untuk dilakukan karena syarat-syarat yang dibutuhkan dianggap sulit untuk masyarakat.

Tabel V.2 Rekap Pasar Kaget di Kecamatan Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah	Ket
1	Pekanbaru Kota	0	
2	Marpoyan Damai	11	
3	Tampan	18	
4	Tenayan Raya	14	
5	Payung Sekaki	11	
6	Rumbai	12	
7	Rumbai Pesisir	2	
8	Bukit Raya	8	
9	Lima Puluh	2	
10	Sail	1	
11	Sukajadi	2	
12	Senapelan	2	
Total		**83**	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2021

Tabel diatas merupakan jumlah pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Tampan memiliki jumlah pasar kaget yang paling dominan dengan total 18 pasar kaget sementara untuk Tenayan Raya ada 14 pasar kaget, Rumbai ada 12 pasar kaget, Payung Sekaki dan Marpoyan damai ada 11 pasar kaget dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sail hanya 1 pasar kaget sementara untuk Pekanbaru Kota sama sekali tidak terdapat kawasan pasar kaget didalamnya. Dengan demikian total pasar kaget yang ada di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru adalah 83 pasar kaget.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas menambah kekuatan pernyataan dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bahwa jumlah pasar kaget yang ada di Kota Pekanbaru ada 83 pasar kaget dan itu akan terus bertambah sehingga perlu adanya penertiban untuk semua pasar kaget.

Kemudian untuk mengetahui jumlah pasar kaget yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 Rekap Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Lokasi Pasar		Hari dan Jam Operasi	Nama Penanggung Jawab
		Kelurahan	Alamat		
1	Lapangan Bola Matador	Maharatu	Jl. Pahlawan Kerja, RT.2 RW.3	Jumat dan Senin, 15.00-18.00 WIB	Jose Vinando
2	Pasar Kaget Katio	Tangkerang Tengah	Jl. Katio RT.1 RW.19	Jumat, 15.00-18.00 WIB	Joni
3	Pasar Kaget Sidomulyo	Perhentian Marpoyan	Jl. Rajawali RT.4 RW.11	Jumat, 15.00-18.00 WIB	
4	Pasar Kaget Kartama	Maharatu	Jl. Pahlawan Kerja RT.4 RW.6	Rabu dan Sabtu, 15.00-18.00 WIB	Andi Saputra
5	Pasar Kaget Nurul Amal	Sidomulyo Timur	Jl. Nurul Amal RT.2 RW.1	Rabu, 15.00-18.00 WIB	Eri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6	Pasar Todak	Tangkerang Barat	Jl. Todak RT.1 RW.9	Sabtu	
7	Pasar Puja Sera	Sidomulyo Timur	Jl. Arifin Ahmad RT.4 RW.11	Rabu dan Sabtu	
8	Pasar Kaget Senin	Perhentian Marpoyan	Jl. Bangau Raja RT.1 RW.13	Senin, 15.00-18.00 WIB	
9	Pasar Kaget Melati	Sidomulyo Timur	Jl. Melati RT.3 RW.5	Senin	
10	Pasar Kaget Melem	Tangkerang Barat	Jl. Malem Via Jl. Paus	Selasa, 15.00-18.00 WIB	
11	Pasar Kaget Tenggiri	Wonorejo	Jl. Tenggiri RT.2 RW.7	Selasa	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap pasar kaget yang tersebar di Kecamatan Marpoyan Damai mempunyai jadwal masing-masing dengan waktu pengadaan yang sama yaitu mulai dari pukul 15.00s/d 18.00 WIB. Dari total 11 pasar kaget yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai terdapat beberapa pasar kaget yang diadakan dalam kurun waktu dua kali dalam seminggu yaitu Pasar Kaget Lapangan Bola Matador, Pasar Kaget Kartama, dan Pasar Puja Sera. Sementara untuk Pasar Kaget Katio, Pasar Kaget Sidomulyo, Pasar Kaget Tenggiri, Pasar Kaget Nurul Amal, Pasar Todak, Pasar Kaget Senin, Pasar Kaget Melati, dan Pasar Kaget Melem diadakan dalam kurun waktu seminggu sekali.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya Pemerintah Kota Pekanbaru beserta tingkatan pemerintahan dibawahnya telah melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial terhadap pertumbuhan maupun pengelolaan setiap pasar kaget melalui penertiban pasar kaget untuk meminimalisir terjadinya dampak-dampak yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam hal kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru beserta tingkatan pemerintahan dibawahnya tidak pernah memberikan izin resmi atau melegalkan pasar kaget manapun, pasar kaget tersebut ada dan dikelola oleh local strongmen seperti pemuda masyarakat setempat yang mempunyai pengaruh di masyarakat, tokoh masyarakat bahkan RW/RT yang ada di lingkungan masyarakat sekitar pasar kaget tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwasanya pasar kaget yang berada di Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai dijalankan tanpa adanya izin legalitas formal, pedagang di pasar kaget tersebut hanya sebatas menyewa lapak dagang dengan orang yang mempunyai tanah pasar kaget tersebut. Beberapa waktu lalu pihak Kelurahan Maharatu sudah memberikan himbauan melalui spanduk untuk memberhentikan aktivitas tetapi pasar tersebut tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Ini dapat dinyatakan bahwa dalam pengelolaan pasar kaget pihak pemerintah tidak turut serta, tetapi pengelolaan pasar kaget ini dikelola oleh local strongmen yang merupakan bagian dari pemerintahan bayangan mempunyai otoritas yang berpengaruh dilingkungan masyarakatnya sehingga tanpa adanya izin resmi pasar kaget tersebut tetap jalan sebagaimana dengan mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk indikator kontrol sosial atau pengendalian sosial Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai, maupun Pemerintah Kelurahan Maharatu sudah melakukan kontrol sosial melalui penertiban dalam pengelolaan pasar kaget tetapi untuk pengelolaan pasar kaget itu sendiri aktor yang terlibat didalamnya merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

local strongmen yang mempunyai otoritas yang berpengaruh di lingkungan masyarakat serta memang mempunyai lahan untuk mendirikan ataupun mengadakan keberadaan pasar kaget tersebut yang dominan didukung oleh pemuda pancasila atau pemuda setempat.

2. Strategi Bertahan

Strategi adalah pola-pola berbagai usaha yang direncanakan oleh manusia untuk dapat memenuhi syarat minimal yang dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di situ, ola-pola disini adalah pola-pola perilaku atau tindakan (Ahimsa Putra,2003:12).

Strategi bertahan dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh seseorang, atau sekolompok orang untuk mempertahankan eksistensi kediriannya yang bernilai atau dianggap bernilai, baik yang bersifat material maupun non material (Haviland,1983:36). Salah satu contohnya seperti strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk local, yang berdasarkan kondisi ini ia memperoleh basis legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat sendiri.

Strategi bertahan meupakan suatu cara untuk menyusun bagaimana mengelola dan memanfaatkan sesuatu agar menjadi berdayaguna dan berhasilguna melalui kegiatan tertentu untuk mempertahankan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Suharto (2009:29) strategi bertahan adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menimpa kehidupannya dengan melakukan segala cara, strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola aset yang dimilikinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan menurut Snel dan Staring (dalam Setia, 2005:6) stategi bertahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dipilih sesuai standard oleh individu atau sekelompok masyarakat misalnya dalam hal sosial ataupun ekonomi.

Menurut Suharto (2009:31) strategi bertahan terutama untuk bertahan hidup dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi bertahan hidup dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu :

1. Strategi aktif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.
2. Strategi pasif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir berbagai macam pengeluaran untuk mempertahankan ekonomi.
3. Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan sosial yang dapat dilakukan dengan cara menjalin relasi, baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan.

Dapat disimpulkan bahwa melalui strategi bertahan dapat menguasai atau mempertahankan eksistensi seseorang atau sekelompok orang yang dianggap bernilai, baik yang bersifat material maupun non material sehingga dengan itu ia dapat menguasai hajat hidup orang banyak atau kalangan penduduk local, untuk meningkatkan basis legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat itu sendiri.

Untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan yang digunakan oleh local strongmen yang merupakan bagian dari pemerintahan bayangan ini dilihat dari bagaimana mereka bertahan dengan memanfaatkan atau menguasai hajat hidup

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penduduk lokal melalui sub indikator kepentingan masyarakat dengan adanya pasar kaget itu sendiri. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

> *" Dapat dikatakan bahwa keberadaan pasar kaget ini sendiri itu mempunyai tempat juga terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang artinya dengan adanya keberadaan pasar kaget ini tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat terbantu dengan jarak yang cukup dekat dan terlebih lagi harganya lumayan murah. Hal ini yang menyebabkan keberadaan pasar kaget itu sendiri bertahan dan terus tumbuh dikalangan masyarakat meskipun ada beberapa masyarakat yang mengeluh terkait dengan kebersihan yang tidak terjaga ataupun kemacetan jalan yang ditimbulkan. Sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar kaget yang jaraknya tidak terlalu jauh dibandingkan pasar rakyat yang memang sudah resmi, dan untuk pedagang mereka pastinya diuntungkan dengan keberadaan pasar kaget yang notabenenya pembelinya lebih banyak jika dibandingkan dengan pasar rakyat biasa. Ini juga yang membuat pedagang pasar kaget itu membuka lapak dimana-mana dan tidak hanya satu pasar kaget saja"* (Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Saiful Amri, SE Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Edwan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai dalam hasil wawancara sebagai berikut :

> *" Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat kemungkinan terbantu karena memang yang berada di pasar kaget tersebut bukan hanya masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai saja, tetapi ada yang dari Kecamatan Bukit Raya ataupun daerah lain makanya keberadaan pasar kaget itu selalu bertahan walaupun sudah ada penertiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi sedikit banyaknya memang keberadaan pasar kaget ini membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat"* (Wawancara, 12 Maret 2021, Bapak Edwan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 09.00 WIB)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu untuk melihat bagaimana pasar kaget ini dapat menguasai sistem ekonomi didalam masyarakat sementara dalam hal pengelolaannya sendiri tidak memiliki izin resmi, dapat dilihat melalui sub indikator sistem ekonomi melalui hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

> *" Pasar kaget ini walaupun tidak berjalan dengan izin resmi mereka masih tetap beroperasi dengan bantuan local strongmen yang berada di wilayah tersebut karena mungkin mereka bisa menguasai system ekonomi yang ada dimasyarakat terlebih lagi dimasa pandemi sekarang itukan banyak masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi. Kita juga menimbanglah bagaimana yang dirasakan masyarakat terhadap ekonomi sekarang, tidak bisa dipungkiri keberadaan pasar kaget itu juga menambah perekonomian mereka dan juga dibalik beroperasinya pasar kaget ini juag dilindungi kemungkinan pemuda setempat ataupun RT/RW setempat"* (Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Saiful Amri, SE Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Maharatu dalam hasil wawancara seperti berikut :

> *" Keberadaan pasar kaget disatu sisi memang menguntukan masyarakat baik itu dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah dengan jarak yang mudah dijangkau karna masyarakat mana yang tidak mau diberi kemudahan seperti itu terlebih lagi mengenai kebutuhan pokok kan dan untuk pedagang juga itu membantu perekonomian mereka menjadi lebih lancer lagi Karen pasar kaget di Marpoyan Damai ini lumayan besar-besar yaa dan ketika beroperasi memang aktif sekali. Hanya saja disisi lain ini masalah ketentraman dan ketertiban yang lumayan menganggu seperti menimbulkan banyaknya sampah ataupun kemacetan yang terjadi akibat keberadaan pasar kaget ini"* (Wawancara, 12 Maret 2021, Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi Sekretaris Lurah Kelurahan Maharatu, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya untuk memperkaya informasi mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun sistem ekonomi dalam pengadaan pasar kaget ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari lingkup pedagang dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Ibu Putri selaku pedagang pasar kaget di Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, sebagai berikut :

> *" Untuk pemenuhan masyarakat sekitar mengenai kebutuhan pokok di pasar kaget ini sudah lengkap semua mulai dari sayur mayor, ikan, bumbu, bahkan yang berjualan baju-baju itu juga sudah ada, jadi sudah pasti sangat terpenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu untuk kita sebagai pedagang, kalau selama covid ini memang tidak mendapat persentase keuntungan seperti biasanya dan agak menurun karena memang kan terutama untuk di Pahlawan Kerja ini dominan itu anak-anak kuliah yang membeli sementara mereka selama covid tidak masuk kan jadi keuntungan yang kita dapat itu lebih kecil juga. Kalau sebelum covid ini, Alhamdulillah keuntungan yang kita dapat itu lumayan jadi terpenuhilah kebutuhan dan ekonomi kami para pedagang juga"* (Wawancara, 17 Maret 2021, Ibu Putri Pedagang Pasar Kaget di Jl. Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 16.30 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sarah selaku masyarakat yang tinggal di sekitar pasar kaget melalui hasil wawancara sebagai berikut :

> *" Sebagai masyarakat yang berada disekitaran pasar kaget saya merasa cukup mudah memenuhi kebutuhan pokok dengan keberadaan pasar kaget ini, terlebih lagi harganya lebih murah dan juga untuk pasar kaget di Pahlawan Kerja ini cukup besar sehingga barang-barang yang dijual itu bisa dibilang cukup lengkap. Kita masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke pasar biasa untuk mendapatkan kebutuhan poko, walaupun pasar kaget ini menimbulkan kemacetan tapi ya kita samasama tahu aja mereka membutuhkan ekonomi sedangkan kita sebagai pembeli membutuhkan barang yang mereka jual begitu"* (Wawancara, 17 Maret 2021, Ibu Sarah Masyarakat Sekitar Pasar Kaget di Jl. Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 17.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya keberadaan pasar kaget ini masih terus bertahan itu dikarenakan pasar kaget mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan juga memperbaiki ekonomi terutama masyarakat yang merupakan pedagang pasar kaget tersebut. Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah beberapa kali melakukan penertiban ataupun penggusuran, itu hanya akan bertahan sebentar kemudian mereka akan tetap melanjutkan aktivitas tersebut. Selain itu, keberadaan pasar ini juga didukung dan dikelola oleh local strongmen seperti halnya preman setempat dalam hal keamanan, jadi kehadiran pasar kaget ini sendiri juga diterima masyarakat walaupun tidak jarang masyarakat merasakan dampak nya seperti kemacetan dan juga permasalahan sampah yang di timbulkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam hal pasar kaget terutama itu untuk pasar kaget di Jl. Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai pengelolaannya memang dilakukan oleh pemuda setempat atau dapat dikatakan local strongmen, tetapi pasar kaget ini juga menjadi akses kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka terutama dalam hal kebutuhan pokok dan pemenuhuan kebutuhan ekonomi bagi pedagang pasar kaget tersebu. Sehingga mereka tidak memperdulikan apakah pasar kaget ini sifatnya legal atau illegal, yang menjadi patokan mereka hanya mendapatkan harga yang murah dengan akses yang mudah dijangkau.

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator strategi bertahan ditemukan bahwa pasar kaget tetap bertahan walaupun tidak mempunyai izin resmi dikarenakan pasar tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih banyak memilih melakukan transaksi jual beli di pasar kaget dari pada pasar resmi yang mana harganya berbeda dengan pasar kaget. Begitu juga dengan pihak pedagang pasar kaget yang lebih memilih berjualan di pasar kaget yang mudah untuk masuk dan tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memenuhi syarat tertentu dibandingkan dengan pasar resmi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Pembangunan Eksistensi Lokal

Pembangunan sering kali diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas yang tujuannya bisa berpengaruh untuk masa mendatang sehingga mengahasilkan suatu perubahan. Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dengan sengaja dilakukan oleh suatu Negara atau bangsa untuk menuju kepada mordenitas dalam rangkan pembinaan bangsa.

Sementara menurut Joseph J Spenglerr dalam Listyaningsih (2014:44) menyatakan bahwa pembangunan termasuk sebagai sesuatu untuk peningkatan kenikmatan, pembangunan ini dapat dilihat sebagai kemampuan ekonomi ataupun lebih mengarah kepada pembangunan politik. Pembangunan ekonomi merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Sementara pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Hakikat pembangunan mengarah kepada upaya untuk membangun masyarakat atau bangsa yang secara utuh menyentuh seluruh lapisan masyarakat demi mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan rakyat (Afifuddin (2012:42). Selain itu tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dengan tujuan perubahan kea rah yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pembangunan yang dimaksud adalah upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah tetapi dipengaruhi dan bahkan terhambat oleh eksistensi dari masyarakat setempat atau local strongmen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang memiliki otoritas lumayan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana eksistensi masyarakat lokal atau local strongmen dapat mempengaruhi suatu pembangunan dalam hal pengelolaan pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

> *" Dalam pengadaan pasar kaget ini memang masyarakat lokal juga memegang peran didalamnya, karena yang membuka lahan pasar kaget ini juga mereka dan dalam hal pembukaan lahan mereka tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang termasuk sebagai salah satu syarat untuk pendirian pasar termasuk juga pasar kaget ini. Jadi dengan keberadaan pasar kaget ini juga menghambat pembangunan yang kita laksanakan terutama dibidang ekonomi ya, kan kita sudah dirikan pasar-pasar resmi yang tegolong dalam pasar rakyat tetapi dengan adanya pasar kaget masyarakat lebih memilih untuk melakukan aktifitas jual beli disana dibandingkan dengan pasar resmi yang sudah kita dirikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan banyak juga pedagang-pedagang kita yang dari pasar resmi juga banyak membuka lapak di pasar kaget karna di pasar rakyat yang resmi jualan mereka sepi jadi mereka melakukan aktifitas dipasar kaget. Kita juga tidak mempermasalahkan itu, mereka melakukan itu untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi mereka juga begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Cuma dari segi pemerintah kita tidak bisa mengontrol barang yang masuk kepasar kaget tersebut apakah barangnya memang bagus atau tidak, higenis atau tidak. Dan biasanya kalau orang jual murah ka nada juga timbangannya yg dikurangin atau kurang tepat sementara untuk di pasar rakyat yang resmi timbangan itu kami kontrol semuanya karena yang berwenang dalam hal pengelolaan pasar itu juga kamikan terlebih lagi jika pasar tersebut telah memiliki izin resmi dari kita. Untuk pasar kaget ini kami juga melakukan beberapa kajian seperti kajian apakah pasar kaget ini menguntungkan masyarakat atau tidak , dari segi kendaraan juga apakah membuat kemacetan atau tidak selanjutnya seperti kajian lingkungan apakah membuat kotor atau tidak. Selama ini kebanyakan dalam pengadaan pasar kaget sampah-sampah itu tidak dibersihkan, menyebabkan kemacetan jadi itukan berdampak kemasyarakat tetapi disisi lain juga masyarakat terbantu akan keberadaan pasar kaget ini"* (Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Saiful Amri, SE Kepala Seksi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Saptir, S.Sos selaku Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam hasil wawancara sebagai berikut :

> *" Lahan yang digunakan para pedagang pasar kaget itu tidak lain dan tidak bukan adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan seperti masyarakat, mereka melihat ada keuntungan yang bisa diambil disana terutama dengan adanya keberadaan pasar kaget ini sehingga pemuda setempat ataupu RT/RW itu tidak mempermasalahkan pasar ini illegal dalam pelaksanaannya. Sehingga pembangunan yang kita upayakan itu juga terhambat oleh keberadaan pasar ini, jika pasar ini resmi kan itu juga masuk retribusinya ke pemerintah karena ini tidak resmi mungkin hasil dari pasar kaget ini masuk ke yang punya lahan. Sehingga sekarang kita mulai mengadakan penyeleksian pasar kaget mana yang pantas untuk ditumbuh kembangkan dan mana yang tidak itu kita tumbangkan. Karena disisi lain juga tidak menguntungkan masyarakat ataupun pemerintah karena yang mereka pakai itu merupakan fasilitas umum"*((Wawancara, 4 Maret 2021, Bapak Bapak Saptir, S.Sos Kepala Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pukul 10.30 WIB)

Selain itu mengenai dampak terhadap adanya pengelolaan pasar keget yang dikelola diluar pemerintahan yang resmi, dari hasil wawancara dengan Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Maharatu adalah sebagai berikut :

> *" Untuk dampak itu lebih ke masyarakat ya karna masyarakat itu terbantukan dalam pemenuhan kebutuhan mereka melakui pengadaan pasar kaget ini. Terlebih lagi mereka melakukan aktifitas jual beli disitu tentunya tidak memperhatikan atau tidak mau tau apakah pasar tersebut legal atau illegal, selama itu masih ada untungnya bagi mereka tentu mereka masih tetap beraktifitas. Kalau untuk kelurahannya sendiri tidak ada dampaknya sama sekali, dampaknya paling ya itu kelurahan kan juga ada namanya Babinsa dan Babinkamtibnas ya mau tidak mau itu sebenarnya mengganggu seperti dalam hal ketertiban ini. Untuk keluhan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *masyarakat sendiri saya rasa itu bergantung pada adanya keuntungan pribadi seperti itu, ada pernah keluhan yang datang ke Kelurahan dan ternyata dia adalah preman setempat yang kalah saing untuk pengamanan disitu tapi kita sebagai pihak kelurahan juga tidak bisa ikut campur karna organisasi mereka itu membentuk sendiri dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan pemerintah kelurahan. Malah kalau kami dari pihak kelurahan atau Pemerintah Kota sendiri itu harusnya dibubarkan, pernah waktu masa PSBB kemarin kita keluarkan semacam spanduk untuk himbauan pembubaran tetapi karna masih tetap berjalan kemudian kita turun bersama Salpol PP juga untuk membubarkannya.Hanya saja itu tidak berlangsung lama, sebulan kemudia mereka memulai aktifitas lagi."* (Wawancara, 12 Maret 2021, Ibu Sakinah Anggraini, S.Psi Sekretaris Lurah Kelurahan Maharatu, Pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan pasar kaget yang berada di Jl. Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai yang dilakukan oleh pemerintahan bayangan seperti local strongman dalam mayarakat tersebut, dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku pedagang pasar kaget di Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, sebagai berikut :

> *" Kalau disini sistem menyewa lapaknya untuk pertama kali masuk bayar kemudian untuk perharinya bayar uang lapak itu Rp 10.000 untuk setiap pedagang. Ini dibayar ke pengurusnya yang merupakan masyarakat disini juga dan dia yang punya tanah, jadi istilahnya dia punya tanah dialah yang membuat pasar kaget ini dan dialah yang menjadi pengurusnya jadi duit lapaknya emang untuk dia. Untuk biaya pertama kali buka lapak itu tergantung mejanya seberapa besar, kan kalau dipasar biasa yang resmi itu perbulan kalau disini cuma bayar meja aja pertama habis itu perharinya Rp 10.000 dan untuk uang parkir Rp 2000. Kemudahan di pasar kaget ini kalau kita engga jualan itu engga bayar dan lapaknya nanti bisa jadi disewakan ke orang kalau kita ga datang"* (Wawancara, 17 Maret 2021, Ibu Putri Pedagang Pasar Kaget di Jl. Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 17.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Inang selaku pedagang pasar kaget di Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai dalam hasil wawancara sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *“ Kalau kita pedagang untuk sistem berjualan di pasar kaget itu berubah-rubah terus, karena pasar kaget ini ada dua kali seminggu jadi kita hari selasa bisa jadi di UIR, hari rabu di Pahlawan Kerja nanti kamis sama minggu di utama lagi jadi setiap minggunya ganti-ganti pasar. Untuk sewa lapak disini dari pertama kali kita buka lapak sampai seterusnya meja lapak kita tetap berada disini kecuali kalau kita tidak datang baru ada pedagang yang menumpang di meja kita gitu. Kalau jualan di sini itu kita lebih terbantu dari pada pasar induk, karena kalau pasar induk kan tiap bulan kita harus bayar nah itu kan ratus-ratusan kalau ini misalnya jualan kita ngga laku itu ngga dibayar juga nggapapa seperti diberi toleransilah jadi mereka lebih ngerti sama keadaan kita, kalau pasar induk mana ngerti kan tetap bulanan itu harus dibayar. Itu yang membuat kita sebagai pedagang lebih nyaman berjualan di pasar kaget seperti ini”* (Wawancara, 17 Maret 2021, Ibu Inang Pedagang Pasar Kaget di Jl. Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai, Pukul 17.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya dalam hal pembangunan yang terjadi memang terhambat dengan eksistensi local strongman yang lebih mendominasi keberadaannya ditengah masyarakat dibandingkan dengan pemerintah setempat sehingga mereka lebih bisa mengendalikan ataupun mempertahankan hal tersebut terutama dalam pengelolaan pasar kaget ini.

Sesuai dengan observasi penulis bahwa pengarus local strongman memang dominan dalam hal pengeloaan pasar kaget terlebih lagi pemerintah itu sudah berupaya untuk menertibkan dengan melakukan pembubaran tetapi pasar kaget ini tetap saja berjalan di bawah kuasa mereka walaupun telah diadakan penggusuran mereka akan hilang sementara kemudian kembali lagi melakukan aktifitas pasar. Ini membuktikan bahwa pemuda setempat juga mendukung jalannya kegiatan pasar kaget ini meskipun tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru karena memang mereka sama-sama diuntungkan dalam kehadiran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pasar kaget ini baik yang masyarakat yang mempunyai lahan ataupu pemuda setempat yang mengatur keamanan jalannya pasar kaget tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian untuk indikator pembangunan eksistensi lokal ditemukan bahwa pemerintahan setempat kalah dengan eksistensi keberadaan local strongman. Ini dapat dilihat pada masih berjalannya aktivitas pasar meskipun itu tidak ada izin resmi atau termasuk dalam pasar yang illegal. Disisi lain keberadaan pasar kaget ini dikelola dengan sistem yang tidak terlalu menyusahkan masyarakat ataupun pedagang pasar kaget tersebut, seperti untuk masyarakat harga kebutuhan mereka di pasar kaget ini lumayan murah dibandingkan dengan pasar resmi yang barangnya dikenakan retribusi. Sementara untuk pedagang pasar kaget sistem penyewaannya lebih murah dan tidak merepotkan pedagang berbeda dengan pasar resmi yang biaya retribusinya diwajibkan meskipun mereka tidak berdagang.

C. Faktor-faktor penghambat mengenai Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor-faktor penghambat mengenai Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dari masyarakat yang memiliki lahan pasar kaget yang merasa mereka memiliki hak atas tanah yang mereka punya untuk dikelola sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mereka bisa melakukan atau membangun pasar kaget tanpa perlu izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun pemerintah setempat.

2. Pedagang yang lebih merasa nyaman untuk berjualan di pasar kaget dikarenakan biaya sewa yang murah sehingga mereka tidak merasa terlalu terbebani untuk membayar.
3. Sulitnya untuk bertindak tegas karena kegiatan pasar kaget ini juga merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama untuk pedagang dan hal pemenehuan kebutuhan untuk masyarakat di masa pandemi seperti ini.
4. Adanya pro kontra di lingkungan masyarakat terhadap keberadaan pasar kaget itu sendiri seperti beberapa masyarakat setuju karena membantu memenuhi kebutuhan dengan akses yang mudah dijangkau sebagian lagi tidak setuju karena menyebabkan kemacetan dan kumuhnya lingkungan sekitar mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Bayangan Dalam Pengelolaan Pasar Kaget Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Kaget Pahlawan Kerja Kecamatan Marpoyan Damai) yang dilihat dari :

Pertama Kontrol Sosial atau pengendalian sosial Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai, maupun Pemerintah Kelurahan Maharatu sudah melakukan kontrol sosial melalui penertiban dalam pengelolaan pasar kaget. *Kedua* Strategi Bertahan ditemukan bahwa pasar kaget tetap bertahan walaupun tidak mempunyai izin resmi dikarenakan pasar tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan masyarakat. *Ketiga* Pembangunan Eksistensi Lokal ditemukan bahwa pemerintahan setempat kalah dengan eksistensi keberadaan local strongman.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat mengenai Pemerintahan Bayangan dalam Pengelolaan Pasar Kaget di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut pemahaman dari masyarakat yang memiliki lahan pasar kaget yang merasa mereka memiliki hak atas tanah yang mereka punya untuk dikelola sehingga mereka bisa melakukan atau membangun pasar kaget tanpa perlu izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun pemerintah setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian pedagang yang lebih merasa nyaman untuk berjualan di pasar kaget dikarenakan biaya sewa yang murah sehingga mereka tidak merasa terlalu terbebani untuk membayar. Selain itu, sulitnya untuk bertindak tegas karena kegiatan pasar kaget ini juga merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama untuk pedagang dan hal pemenehuan kebutuhan untuk masyarakat di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya adanya pro kontra di lingkungan masyarakat terhadap keberadaan pasar kaget itu sendiri seperti beberapa masyarakat setuju karena membantu memenuhi kebutuhan dengan akses yang mudah dijangkau sebagian lagi tidak setuju karena menyebabkan kemacetan dan kumuhnya lingkungan sekitar mereka.

B. Saran

Adapun yang menjadi Saran penulis sehubung dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlu adanya usaha dari Pemerintah agar pasar kaget untuk kedepannya dapat benar-benar diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan melibatkan local strongman yang juga bekerja sama dengan pemerintah dan tergolong dalam pasar resmi, sehingga tidak ada lagi penggusuran yang dilakukan di pasar kaget karena juga memberikan dampak bagi perekenomian masyarakat khususnya pedagang;
2. Perlunya pemahaman dari masyarakat dalam penempatan lahan pasar kaget bisa lebih diperhatikan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan banyak persoalan seperti kemacetan ataupun penumpukan sampah sembarangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Afifuddin 2012, Pengantar administrasi pembangunan, Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff. (2010). Politik Lokal Di Indonesia : Dari Otokratik Ke Reformasi Politik. Dalam Jurnal Ilmu Politik Edisi 21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2003. Ekonomi Moral,Rasional, dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa. Yogyakarta: Kepel Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Backbro, J., & Nystrom, H. (2006, 01 16).Entrepreneurial Marketing Innovate value creation.

Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial.Jakarata : Kencana Prenanda Media Group.

Creswell, John, 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, London: SAGE Publications

Faisal, sanapiah. 2010. Format-format penelitian sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Garna, Judistira, K. 1999. Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika.

Handoko, T. Hani 2011, Manajemen Personalia Sumberdaya Manusia, BPFE, Yogyakarta

Harriss White B India Working Essays on society and economy Cambridge Cambridge University Press 2003

Haviland, W. A. (1983). Cultural antropologi. New York: CBS College Publishing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hidayat, Syarif. (2007). Shadow State?Bisnis dan Politik di Provinsi Banten dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinten (editor), Politik Lokal di Indonesia (terj. Bernard Hidayat). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.

Lexie M. Giroth, 2004, "Status dan Peran Pendidikan Pramong Praja Indonesia", CV Indra Prahasta, Jakarta.

Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan, Graha ilmu:yogyakarta.

Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Ketujuh, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Jakarta. 1988.

Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

Napitupulu, Paimin, Pelayanan Publik & Costomer Satisfaction, PT Alumni, Bandung, 2007.

Nordhot, Schutle Henk dan Gerry van Klinken dibantu oleh Ireen Karang – Hoogenboom. Politik Lokal di Indonesia. 2007. Pengantar : Anies Baswedan. Yayasan Obor Indonesia. KITLV – Jakarta.

Philip & Duncan.(2012). Marketing Principles and Methods. Georgetown: Richard D. Irwin. Inc.

Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Reno, William. Corruption and State Politics in Sierra Leone.Cambridge University Press.

Resmi Setia. (2005). Gali Tutup Lubang Itu Biasa : Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu. Bandung : Yayasan Akatiga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Roucek, S.J dan Warren, L.R,(1987). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Bina Aksara.

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998

Sehrawat, M.S and J.S Narang.(2001). Production Management, Nai Sarak, Dhanpahat RAI Co.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2010. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana.

Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sitanggang, H. 1998. Filsafat dan Etika Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. (Bandung: PT Refika Aditama).

Suyanto, Bagong dan Sutinah.2011. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Jurnal

Argenti, G. (2018). Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 58-70.

Faathir, A. (2020). *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hidayat, S., & Gismar, A. M. (2016). Good governance vs shadow state dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, *7*(1), 13.

Istiqomah, I. N., & Harsasto, P. (2017). Praktik Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Periode Kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh Di Kota Tegal. *Journal of Politic and Government Studies*, *6*(04), 191-200.

Nugraha, B. A. (2018). Studi Tentang Keberadaan "Terminal Bayangan" Sukun Banyumanik Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, *7*(2), 201-210.

PRATAMA, A. S. (2014). *Masyarakat Mengalahkan Negara:(Studi kasus Negara Bayangan Parkir Kopi Joss Jalan Wongsodirjan Utara Stasiun Tugu, Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Yuliani, F. (2017). *Pengelolaan Pasar Kaget oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail* (Doctoral dissertation, Riau University).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :